

SKRIPSI

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGELOLA PARAWISATA
HUTAN MANGROVE
(Study kasus Di Desa Lembar Selatan Dusun Pesanggaran Kecamatan Lembar
Kabupaten Lombok Barat)**

*Government policy in managing Mangrove Forest Tourism
(Case Study in The Sheet South Desa Sheet District of west Lombok Regency)*



OLEH :

IRSYADUL UMAM
216110018

JURUSAN URUSAN PUBLIK

KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

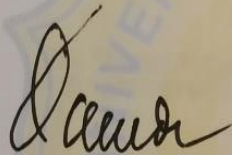
Skripsi ini disetujui oleh pembimbing untuk di ujikan ke Panitia Ujian Skripsi
Program Studi Administrasi Publik pada :

Hari : SENIN
Tanggal : 03 Februari 2020

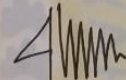
Menyetujui :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



(Drs. Mintasrihardi, M.H)
NIDN. 0830016101



(Baiq Reinelda Tri Yunarni, S.E., M.A., K)
NIDN. 0807058301

Mengetahui,
Program Studi Administasi Publik

Ketua



(RAHMAD HIDAYAT, S.AP., M.AP)
NIDN. 0822048901

PENGESAHAN SKRIPSI
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGELOLA PARIWISATA
HUTAN MANGROVE
(STUDI KASUS DI DESA LEMBAR SELATAN DUSUN PASANGGARAN
KECAMATAN LEMBAR KABUPATEN LOMBOK BARAT)

Oleh :

IRSYADUL UMAM

NIM. 216110018

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Sarjana Pada
Jurusan Urusan Publik Telah disetujui Oleh Tim Penguji
Pada tanggal seperti yang tertera di bawah ini.

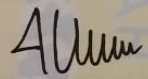
Mataram, 30 Januari 2020

Tim Penguji

Drs. Mintasrihardi, M.H
NIDN. 0830016101

()
Ketua

Baiq Reinelda Try Yunarni, S.E., M.A.K
NIDN. 0821117603

()
Anggota

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

()
Anggota

Mengetahui

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



(Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRSYADUL UMAM

NIM : 216110018

Dengan menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun diperguruan lain).
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Mataram, Februari 2020



IRSYADUL UMAM
NIM. 216110018



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lit.umat.ac.id> E-mail : upt.perpusumat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IPSYDUL UMAN
NIM : 216110018
Tempat/Tgl Lahir : Mataram 15-05-1997
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 081 917 280 675
Jenis Penelitian : ☒ Skripsi ☐ KTI ☐

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

kebijakan Pemerintah terhadap pengelolaan pariwisata hutan mangrove (studi kasus di desa lembar selatan dusun pesanggaran kec. lembar)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 15-02-2020

Penulis

METERAI
TEMPEL
632EAAHF263294691

6000
ENAM RIBU RUPIAH

NIM. 216110018

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos. M.A.
NIDN: 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tidak ada kesuksesan tanpa kesulitan.”

-Sopholces-

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuasaya **Bapak Abdul Talib, S.H** dan **Mama Fariani** yang selalu memberikan do'a, dukungan dan menjadi penyemangat terhebat selama penyusunan skripsi ini.
2. Adik saya, **Erni Nadiawati** yang telah mensupport saya dalam penyelsaian skripsi ini.
3. Terimakasih kepada keluarga besarsaya yang selalu memberikan semangat dan menghibur disaat lelah dengan dunia skripsi.
4. Teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2016, terimakasih untuk semangat, pengalaman berharga dan kesan yang sudah kita hadapi bersama.
5. Alamamater tercita Universitas Muhammadiyah Mataram tempat saya menimba ilmu sejak tahun 2016 - 2020.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“Kebijakan Pemerintah Dalam Mengelola Pariwisata Hutan Mangrove (Studi Kasus Di Desa Lembar Selatan Dusun Pesanggaran Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam kesempatan ini, peneliti menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram dan jajarannya.
2. Bapak Drs. H.M Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP selaku Ketua Prodi Administrasi Publik.
4. Bapak Drs. Mintasrilhardi, MH. selaku Dosen Pembimbing I dan ibu Baiq Reinelda Tri Yunarni, SE.M.AK selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih atas segala keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam menyusun Skripsi.
5. Kedua Orang Tua saya yang sangat berjasa dan selalu mendoakan dan memberikan dukungan tanpa lelah sehingga Proposal ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

6. Untuk Rena Maulidiana yang telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi saya dan yang selalu ada untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas dari awal kuliah hingga saat ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa Muhammadiyah Mataram dan semua pihak yang telah banyak memberikan semangat yang baik selama mengikuti perkuliahan maupun dalam penyusunan Proposal .

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati dalam menyusun proposal, Penulis sangat menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat peneliti harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima dan bermanfaat secara penuh oleh khalayak umum yang berminat dengan karya ini.

Mataram, Desember 2019

Penulis,

IRSYADUL UMAM
216110018

ABSTRAK
Kebijakan Pemerintah Dalam Mengelola Pariwisata Hutan Mangrove
(Studi Kasus Di Desa Lembar Selatan Dusun Pesanggaran Kecamatan Lembar
Kabupaten Lombok Barat)

Irsyadul Umam

dalam proses pengembangan kawasan wisata hutan mangrove sebagai asset wisata desa dapat menyimpulkan bahwa pengembangan kawasan wisata desa sangat penting untuk mendorong pembangunan yang ada di Lombok Barat, khususnya masyarakat desa Lembar Selatan Dusun Pesanggaran. Dan mengingat program-programnya pemerintah ingin memajukan kawasan wisata guna untuk meningkatkan pembangunan tentu kita harus memulai dari desa, untuk karena itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat lebih baik memperhatikan kawasan deas wisata Khususnya Kawasan Wisata Hutan Mangrove. Wisata Hutan Mangrove saat ini terlihat kerusakan yang lumayan parah sehingga pengunjung local maupun asing yang dating kewisata hutan mangrove lumayan kecewa dikarenakan cukup berpotensi wisata mangrove untuk dikembangkan maka dari itu pihak pemerintah maupun pengelola harus lebih lagi memperhatikan dan mengembangkan wisata hutan mangrove guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

ABSTRACT

Government Policies in Managing Mangrove Forest Tourism (Case Study in South Sheet Village of Pesanggaran Hamlet, Sheet District, West Lombok Regency)

Irsyadul Umam

In the process of developing the mangrove forest tourism area as a village tourism asset, it can be concluded that the development of the village tourism area is very important to encourage development in West Lombok, especially the people of the South Sheet village of Pesanggran. And given the government's programs want to advance the tourist area in order to increase development, of course we have to start from the village, separately because of that the local government and the central government better pay attention to the tourist village area, especially the Mangrove Forest Tourism Area. Mangrove Forest Tourism is currently seen quite severe damage so that local and foreign visitors who come to the mangrove forest tour quite disappointed because of the potential of mangrove tourism to be developed, the government and managers must pay more attention and develop mangrove forest tourism in order to improve the welfare of the community .

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
KEPALA
UPT PSB
UNIVERSITAS HIMPUNAN MATAKAM
Husnara, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Penelitian	4
1.3.2 Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1. Penelitian Terdahulu.....	6
2.2. Tinjauan Pustaka	9
2.2.1. Definisi Pemerintahan	9
2.2.1.1. Asas-Asas pemerintahan	10
2.2.1.2. Tugas Pokok Pemerintahan	13
2.2.2. Konsep Kebijakan.....	15
2.2.3. Pengertian Manajemen.....	18
2.2.4. Definisi Mangrove	21
2.2.4.1. Fungsi Konservasi Hutan Mangrove	22
2.2.4.2. Pendayagunaan Hutan Mangrove.....	24
2.2.4.3. Partisipasi Masyarakat Dalam pelestarian hutan Mangrove	25
2.2.5. Definisi Pariwisata	27
2.3. Kerangka Berfikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1. Jenis Penelitian	31

3.2.	Lokasi Penelitian	31
3.3.	Fokus Penelitian	31
3.4.	Metode dan Dasar Penelitian	31
3.5.	Informan Penelitian	32
3.6.	Tehnik Pengumpulan Data.....	33
3.7.	Sumber Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		Error! Bookmark not defined.
4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.1.	Sejaran Desa Lembar Selatan	Error! Bookmark not defined.
4.1.2.	Sruktur Organisasi Desa Lembar Selatan.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.3.	Visi dan Misi Lembar Selatan	Error! Bookmark not defined.
4.1.4.	Peta Desa Lembar Selatan	Error! Bookmark not defined.
4.1.5.	Data Wilayah Desa Lembar Selatan	Error! Bookmark not defined.
4.1.6.	Data Pekerjaan Desa Lembar Selatan	Error! Bookmark not defined.
4.2.	Sejarah mangrove	Error! Bookmark not defined.
4.3.	Kebijakan Pemerintah Dalam mengelola Pariwisata Mangrove ..	Error! Bookmark not defined.
4.4.	Kendala Dalam Mengelola Wisata Hutabn mangrove	Error! Bookmark not defined.
BAB V KESIMPULAN.....		Error! Bookmark not defined.
5.1.	Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
5.2.	Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....		Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya kebutuhan dan aktivitas manusia yang sangat kompleks menyebabkan adanya eksplorasi eksploitasi sumberdaya alam untuk kegiatan pembangunan. pelaksanaan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan telah mampu menaikkan taraf hidup masyarakat. Akan tetapi, kegiatan pembangunan tersebut bisa membawa dampak yang merugikan bagi kelestarian lingkungan sehingga menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan.

Dalam dekade terakhir ini, kegiatan pembangunan di wilayah pesisir cukup pesat, baik untuk perikanan, pemukiman, pertambangan, pariwisata dan sebagainya. Pesatnya pembangunan serta ditambah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, telah menimbulkan berbagai masalah lingkungan di beberapa wilayah pesisir yang ada di Lombok nusa tenggara barat. Permasalahan tersebut di antaranya adalah terjadinya degradasi ekosistem alami. Salah satu ekosistem pesisir yang mengalami tingkat degradasi cukup tinggi akibat pola pemanfaatannya yang cenderung tidak memperhatikan aspek kelestariannya adalah hutan mangrove.

Irwanto (2007) menjelaskan bahwa hutan mangrove merupakan suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhnya bertoleransi terhadap garam. Tumbuhan mangrove bersifat unik karena merupakan gabungan dari ciri-ciri tumbuhan yang hidup di daratan dan di lautan.

Menyadari akan pentingnya kebutuhan hidup dan tingginya ketergantungan terhadap sumberdaya alam seperti mangrove, diperlukan suatu jalan keluar guna memadukan aspek geologis, ekonomis dan sosial budaya supaya dapat dikesinambungkan sehingga mendukung program pembangunan berkelanjutan. Aspek ekologis dari pemanfaatan lahan mangrove harus tetap mempertahankan lahan mangrove sebagai suatu ekosistem pesisir. Aspek sosial budaya dan ekonomi, harus memperhatikan kesinambungan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat terutama bagi mereka yang menggantungkan hidupnya terhadap ekosistem pantai seperti mangrove.

Melihat gejala kerusakan hutan mangrove untuk berbagi kepentingan tersebut maka perlu dilakukan pengelolaan hutan mangrove secara lestari. Untuk dapat melakukan pengelolaan hutan mangrove secara lestari diperlukan pengetahuan tentang nilai strategi dari keberadaan hutan mangrove berbasis masyarakat merupakan salah satu strategi pengelolaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam. Selain itu strategi ini dapat membawa efek positif secara ekologi dan sosial ekonomi.

Tempat wisata yang berada di Desa Cemara Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat memiliki daya Tarik tersendiri dengan panorama alam yang masih asri, sehingga dapat memanjakan mata dan memuaskan hati para wisatawan yang berkunjung. Tetapi, pada periode-periode belakangan ini di lokasi wisata hutan mangrove yang berada di Desa Cemara tersebut telah terjadi kerusakan yang cukup parah. Sehingga pemerintah dan masyarakat sempat juga harus segera melakukan perbaikan wisata mangrove yang berada di Desa Cemara agar perekonomian dan tempat wisata hutan mangrove di Desa Cemara tersebut kembali pulih. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga melakukan pengembangan hutan bakau di kawasan Lombok barat bagian barat adalah salah satu dari 10 lokasi di Indonesia yang secara serentak ditanami mangrove oleh anggota organisasi aksi solidaritas Era Kabinet Kerja (OASEKK). Di Desa Cemara Kecamatan Lembar, dilakukan penanaman 5000 batang mangrove diseluruhnya se Indonesia 53 ribu sejumlah satu pohon mangrove sebagai bagian gerakan menanam mangrove diberbagai daerah Indonesia.

Untuk mencegah kerusakan yang lebih parah terhadap sumberdaya alam khususnya mangrove, upaya menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap keberadaan hutan mangrove harus selalu dilakukan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ **Kebijakan Pemerintah Dalam Mengelola Pariwisata Hutan Mangrove (Studi Kasus di Desa Cemara Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin meneliti bagaimana “Kebijakan Pemerintah Dalam Mengelola Pariwisata Mangrove di Desa Cemara Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Agar mengetahui bagaimana peran pemerintah setempat untuk mengelola pariwisata hutan mangrove.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian di harapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut dalam permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam mengelola pariwisata hutan mangrove dan sebagai tambahan pustaka bagi pihak-pihak lain yang memerlukan inovasi-inovasi baru.

2. Manfaat Praktis

1. bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis tentang kebijakan pemerintah dalam mengelola pariwisata

mangrove serta permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya serta mendukung penelitian-penelitian sebelumnya.

2. Bagi pemerintah setempat diharapkan dapat ,menegtahui sejauh mana dalam meningkatkan inovasi-inovasi di era yang akan datang.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelusuran terhadap karya-karya ilmiah terdahulu yang terkait, untuk menghindari duplikasi dan menjamin keabsahan dan kesahihan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut dalam usaha penelusuran yang dilakukan peneliti mendapatkan dan menemukan beberapa penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, sekaligus mencari objek kajian penting dari penelitian yang lainnya. Penelitian tersebut antara lain:

No	Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan dan perbedaan
1	Tarim Salim, Risma Illa Maulany, Dan Roland A Barkey (2018) Strategi Pengembangabn Ekowisata Mangrove Tongke-Tongke	kualitatif	Persepsi wisatawan mendukung dan menginginkan pengembangan wisata hutan ,mangrove tongke- tongke sebagai kawasan ekowisata.	Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pengembangan ekowisata mangrove. Sedangkan

	Di Kabupaten Sinjani			perbedaannya terletak pada waktu dan lokasi penelitian.
2	Shahibah Yuliani Dan Nova Scorviana Hermanisari (2017) Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Didesa Sengarajaya, Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi.	Kualitatif Desakriptif	Hasil Penellitian menunjukn bahwa pengelolaan partisipasi masyarakat hutan mengrove relative tinggi dari aspek perencanaan dan pelaksanaan kegiatan (restorasi). Parstisipasi masyarakat juga didukung oleh beberapa lembaga yang bekerjasama seperti sosialisasi,	Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini terletakl pada perlibatan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata mangrove. Sedangkan perbedaannya terletak pada waktu dan

			penanaman bakau, dan penegmbangan hutan bakau.	lokasi penelitian.
3	Mega Widya Wati Dan Hartiara Idajati (2017) Identifikasi Karakteristik Pengelolaan Ekowisata Mangrove Wonorejo Berdasarkan Prefrensi Stakeholder	Kualitati Desakriptif	Karakteristik pengelolaan yanf dilakukan dikawasan ekowisata mangrove monorejo belum memenuhi prinsip ekowisata khususnya prinsip konservasi lingkungan. Hal ini ditunjukan dengan adanya tindakan pngelolaan yang mengusir keberadaan kera karena dianggap mengganggu ketenangan pengunjung.	Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pengelolaan ekowisata. Sedangkan perbedaannya terletak waktu dan lokasi penelitian.

2.2. Tinjauan Pustaka

2.2.1. Definisi Pemerintahan

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri. Jadi tidak di artikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Nain (2010:1);

- a. Pemerintah adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang di perintah berdasarkan berbagai posisi yang di pegangnya, misalnya sebagai sovereign, sebagai pelanggan, consumer, yang tidak berdaya sebagainya.
- b. Pemerintah adalah orang yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi ssetiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga ssetiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai tuntutan (harapan) yang di perintah.

Dari kedua kata pengertian pemerintahan sebagaimana di kemukakan di atas, menunjukan bahwa pemerintahan terdiri dari dua unsure yaitu unsur yang memerintah dan unsur yang di perintah. Dalam menjalankan pemerintahan di lakukan oleh badan yang berwenang atau badan yang melakukan kekuasaan memerintah dalam memberikan pelayanan public, untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang di perintah.

Pendapat lain yang sedikit berbeda dengan pengertian pemerintahan seperti di jelaskan sebelumnya yaitu pengertian pemerintahan sseperti di jelaskan sebelumnya yaitu pengertia ppemerintahan dilihat dari pendekatan sistem.

Wasistiono dalam Nain (2017:3) bahwa pemerintahan sebagai badan atau orang yang menjalankan pemerintahan, maupun pemmerintahan sebagai fungsi dan kegiatan pemerintayhan adalah sebuah sistem.

Ada tiga prinsif dasar yang perlu di pahami dalam melihat pemeerintahan ssebagai suatu sistem:

1. Bahwa hubungan antara suprasistem, sistem, dan subsistem dan sub-subsistem diatur melalui barbagai asas yang perlu di sepakati dan dipahami oleh semua anggota susunan sistem.
2. Sistem yang berbeda dalam susunan yang lebih rendah dan yang lebih kecil tunduk pada mekanisme sistem yang susunannya lebih besar dan lebih tinggi.
3. Susunan sistem yang lebih besar dan lebih tinggi punya kewajiban melindungi dan memberdayakan susunan sistem yang lebih rendah dan lebih kecil.

2.2.1.1. Asas-Asas pemerintahan

Berdasarkan penjelasan mengenai kehadiran pemerintah sebagai ssuatu kebutuhan seabgaimana di jelaskan di atas maka dalam menjalankan pemerintahan diperlukan suatu asas, yang menjadi pedoman untuk diketahui dan dipahami. Menurut H.Inu dalam Nain (2010:7) bahwa asas adalah dasar, pedooman atau sesuatu yang di anggap kebenaran, yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan.

Dalam membahas `asas suatu pemerintahan, kita perlu melihat berbagai prinsip-prinsip, pokok-pokok pikiran, tujuan, struktur organisasi, faktor-faktor kekuatan dan proses pembentukan suatu Negara. Hal ini terkait dengan ideologi suatu bangsa, falsafah hidup dan konstitusi yang membentuk sistem pemerintahan. Tentang asa-asas pemerintahan yang berlaku di Indonesia menurut taliziduhu dalam nain (2010:7) adalah pengertian asas dalam arti khusus, secara umum dapat dikatakan bahwa asas-asas pemerintahan tercantum di dalam pedoman-pedoman, peraturan-peraturan, dan jika diurut sampai ketingkat tertinggi, tibalah pancasila.

Adapun beberapa asas pemerintahan yang perlu di ketahui antara lain sebagai berikut Nain (2010:8):

a. Asas aktif

Pemerintah memiliki sumber utama pembangunan, seperti antara lain keahlian, dana, kewenangan, organisasi dan lain-lain. Di Negara-negara berkembang pemerintah senantiasa berada posisi sentral. Oleh karena itu, pemerintah memegang peran inovatif dan inventif.

b. Asas Vrij bestuur

“Vrij” berarti kosong, sedangkan “bestuur” berarti pemerintahan. Jadi Vrij Bestuur adalah kekosongan pemerintahan. Hal ini timbul karena melihat bahwa tidak seluruhnya penjabaran setiap departemen dan non departemen sampai ke tingkat kecamatan-kecamatan, apalagi di kelurahan dan desa-desa. Sebagai contoh, pada suatu tempat dapat saja terjadi ketidak hadirannya Departemen Parpestol sehingga surat

menyurat yang menumpuk di kecamatan tersebut, baik surat-surat dinas maupun surat-surat pribadi, terbengkalai karena aparat pelaksanaanya kosong.

c. Asas Fries Ermessen

Berlainan dengan asas Vrij Bestuur tersebut di muka, hal man pekerjaan itu ada tetapi aparat pelaksanaannya tidak ada, maka ada asas Fries Ermessen, pekerjaan itu memang belum ada mesti dicari serta di temukan sendiri, jadi terlepas hanya sekedar mengurus hal-hal yang secara tegas telah di gariskan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat yang lebih di atas, untuk di pertanggung jawabkan hasilnya.

d. Asas historis

Asas Historis adalah asas yang dalam penyelenggaraan pemerintahan, bila terjadi suatu peristiwa pemerintahan, maka untuk mengulangnya pemerintah berpedoman kepada penanggulangan dan pemecahan peristiwa yang lalu, yang sudah pernah terjadi.

e. Asas Etis

Asas etis adalah asas yang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah tidak lepas memperhatikan kaidah moral. Oleh karenanya di Negara Indonesia, pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengalaman pancasila senantiasa di galakkan, disamping masing-masing agama berlomba untuk menyampaikan, bahwa pemerintahan bukan masalah skuler yang terpisah jauh dari etika dan moral, tetapi merupakan amanah Allah yang harus di pertanggung jawabkan di akhirat nanti.

f. Asas Otonomi

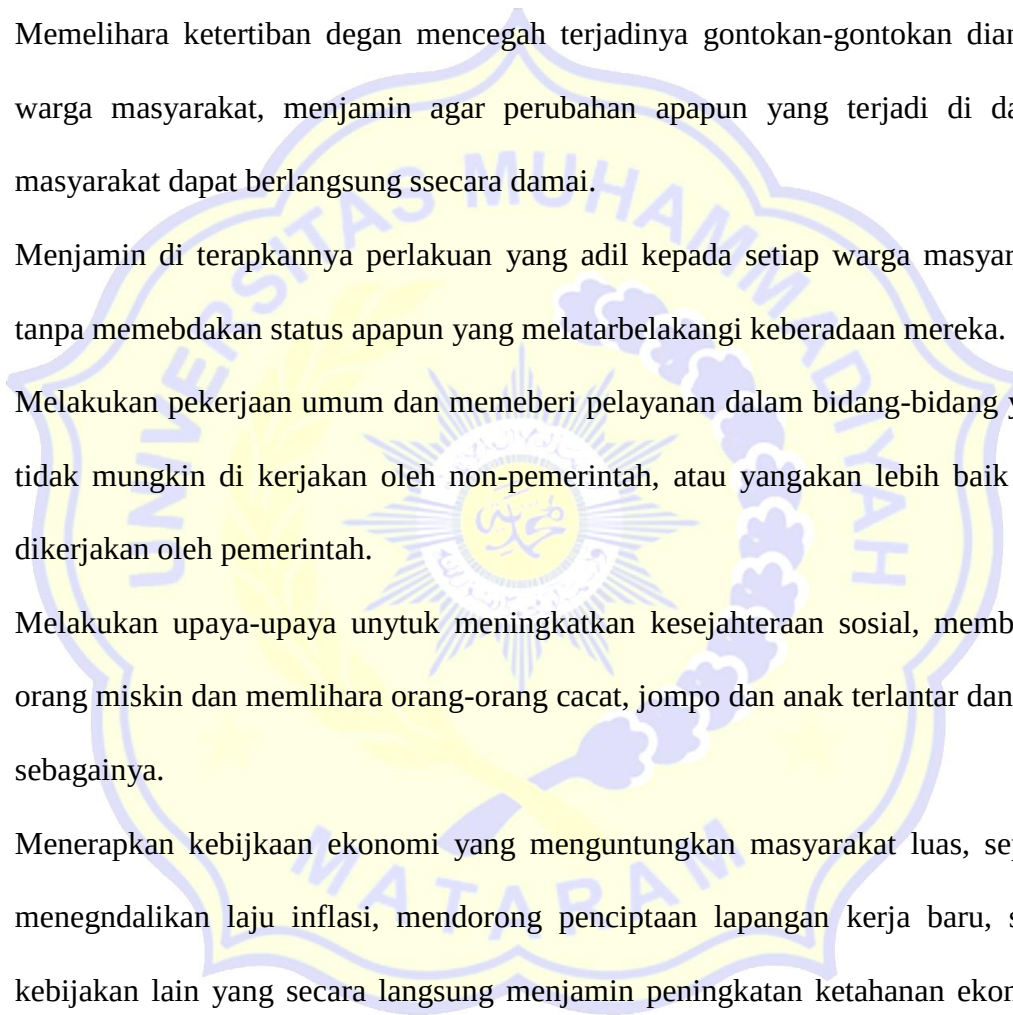
Asas otonomi adalah asas dengan sendirinya, yaitu bila ada suatu kegiatan baru di luar tanggung jawab suatu departemen atau non departemen, baik sifatnya rutin maupun sewaktu-waktu, maka dengan sendirinya pekerjaan itu dipimpin oleh aparat Departemen Dalam Negeri sebagai poros pemerintahan dalam negeri, walaupun dengan tetap melibatkan aparat lain.

g. Asas Detournement de Pouvoir

Asas Detournement de Pouvoir adalah asas kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahannya atau sebaliknya ketidak pedulian pemerintah terhadap masyarakat. Jadi asas ini merupakan pertentangan dari semua asas yang telah disampaikan di atas.

2.2.1.2. Tugas Pokok Pemerintahan

Tujuan utama di bentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem keterlibatan umum di dalam mana setiap warga masyarakat dapat di menjalankan kehidupannya secara wajar. Pemerintahan modern, pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidaklah diadakann untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk memberdayakan dan melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreaktivitasnya untuk mencapai kemajuan bersama. Oleh karena itu menurut rasyid dalam nain(2010:11) secara umum tugas pokok pemerintahan Negara mencakup tujuh bidang pelayanan:

- 
- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah atau mengancam integritas Negara melalui cara-cara kekerasan.
 - b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontokan-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
 - c. Menjamin di terapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
 - d. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh non-pemerintah, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
 - e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin dan memelihara orang-orang cacat, jompo dan anak terlantar dan lain sebagainya.
 - f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi Negara masyarakat.
 - g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, pemerintah juga berkewajiban mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan

untuk pemanfaatn sumber daya alam yang mengutamakan keseimbangan antara explotasi dan relevasi.

2.2.2. Konsep Kebijakan

Kebijakan Publik dalam kerangka substantif adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. Dengan membawa kebijakan publik dalam ranah upaya memecahkan masalah publik maka warna administrasi publik akan terasa kental. Kebijakan publik diarahkan untuk memecahkan masalah publik guna memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik. Dan kebijakan sejauh mungkin diupayakan berada dalam rel kebijakan yang beraras pada sebesar-besarnya kepentingan publik (Dwiyanto, 2017:18-19).

Laswell dalam Thoha (1984:58) menyatakan *policy as a projected program of goals, values, and practice*, atau kebijakan dapat dirumuskan sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu dan praktek-praktek tertentu. Sedangkan Dunn juga berpendapat bahwa kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Jadi kebijakan adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat demi mencapai tujuan bersama.

Negara yang memegang penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang

dibuat dan dikeluarkan oleh negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan tersebut. Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Erwan, 2012 : 19).

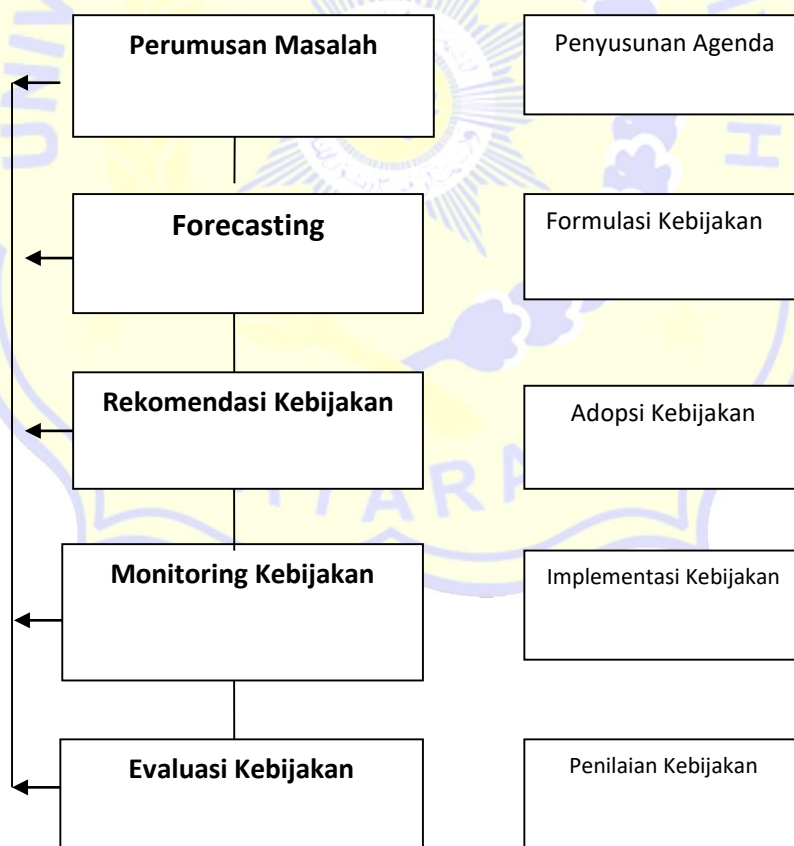
Menurut Anderson (1975) (dalam Solichin, 2012:12) kebijakan publik adalah kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah dimana implikasi dari kebijakan tersebut adalah : (1) kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tindakan-tindakan; (2) kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah; (3) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan; (4) kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negative dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; (5) kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

W.I. Jenkins (dalam Wahab, 2015 : 14) merumuskan kebijakan sebagai “ *asset of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve* ” (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik

atau sekelompok aktor politik yang berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut .

Menurut Dunn (1994) dalam (Dwiyanto, 2017) bahwa kebijakan publik lebih mudah dipahami jika dikaji tahap demi tahap. Inilah yang menjadi kebijakan publik “penuh warna” dan kajiannya amat dinamis. Berbicara mengenai proses kebijakan publik Dunn pun menggambarkan proses kebijakan publik sebagai berikut :

Gambar 2.2.1 Proses Kebijakan Publik



(Sumber : Dunn, 1994 dalam Dwiyanto, 2017:20)

2.2.3. Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen mempunyai tujuan-tujuan tertentu dan bersifat tidak terwujud (*intangible*) . Manajemen juga merupakan suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan 26 bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang dilakukan. Definisi yang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan dan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Manajemen merupakan sebuah kegiatan pelaksanaannya disebut manajing dan orang-orang yang melakukannya disebut manajer. Manajemen dibutuhkan setidaknya untuk mencapai tujuan, menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pengelolaan hutan secara lestari harus mencakup beberapa fungsi teknis, finansial, personal, fungsi administrasi dan fungsi kepemimpinan yang berkaitan dengan

unsur-unsur manajemen (POAC). Menurut terry (2010:9), fungsi manajemen dapat dibagi menjadi empat bagian, yakni planning (*perencanaan*), organizing (*organisasi*), actuating (*pelaksanaan*), controlling (*pengawasan*):

1) *Planning* (perencanaan)

- a. Planning (perencanaan) merupakan penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Planning mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termaksud sudah dalam pemilihan alternative-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat kedepan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.
- b. Proses perencanaan berisi langkah-langkah:
 1. Menentukan tujuan perencanaan
 2. Menentukan tindakan untuk mencapai tujuan
 3. Mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang
 4. Mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan dan
 5. Mengimplementasi rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya.

2) *Organizing* (organisasi)

- a. Organizing berasal dari kata organon dalam Bahasa Yunani kuno yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer

(Terry & Rue, 2010:82). Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil.

b. Ciri-ciri organisasi

- 1) Mempunyai tujuan sasaran
- 2) Mempunyai keterkaitan format dan tata tertib yang harus di taati.
- 3) Adanya kerjasama dari sekelompok orang , dan
- 4) Mempunyai koordinasi tugas dan wewenang

3) Actualing (pelaksanaan)

Pelaksanaan atau pergerakan merupakan usaha untuk menggerakkan anggota-anggotakelompok demikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.

4) Controlling (pengawasan)

Controlling atau pengawasan adalah mendeterminasikan apa yang telah dilaksanakan, mengevaluasi prestasi kerja apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.

a. Tipe-Tipe pengawasan

1. *Feedward control* dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah dan penyimpangan dari standar tujuan dan memungkinkan koreksi sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.

2. *Concurrent control* merupakan proses dalam aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu sebelum suatu kegiatan dilanjutkan atau untuk menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kerja.
3. *Feedback control* mengukur dari hasil-hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan.

2.2.4. Definisi Mangrove

Hutan mangrove merupakan hutan yang tumbuh di muara sungai, daerah pasang surut atau tipe laut. Mangrove adalah individu atau komunitas tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut. Hutan mangrove sering disebut sebagai hutan bakau atau hutan payau. Disebut hutan bakau oleh karena sebagian besar vegetasinya dinamakan oleh jenis bakau, dan disebut hutan bakau karena hutannya tumbuh di atas tanah yang selalu tergenang oleh air payau.

Ekosistem mangrove merupakan sumberdaya alam daerah tropis yang mempunyai manfaat ganda baik aspek ekologi maupun sosial ekonomi besarnya peranan ekosistem mangrove bagi kehidupan dapat diketahui dari banyaknya jenis hewan, baik yang hidup di perairan, di atas lahan maupun di tajuk-tajuk pohon mangrove serta ketergantungan manusia terhadap ekosistem mangrove tersebut.

(Bengen 2000;20) menyatakan bahwa ekosistem mangrove memiliki fungsi antara lain:

a. Sebagai pelindung pantai dari gempuran ombak, arus dan angin:

1. Sebagai tempat berlindung, berpijah atau berkembang baik dan daerah asuhan berbagai jenis biota.
2. Sebagai penghasil bahan organik yang sangat produktif (destritus)
3. Sebagai sumber bahan baku industri bahan bakar
4. Pemasok larva ikan, dan biota laut lainnya
5. Tempat pariwisata

Secara fisik ekosistem mangrove dapat berfungsi sebagai hutan lindung yang mempengaruhi pengaliran massa air di dalam tanah. Sistem perakaran yang khas pada tumbuhan mangrove dapat menghambat arus air dan ombak, sehingga menjaga garis pantai tetap stabil dan terhindar dari pengikisan (abrasi). Keadaan ekosistem mangrove yang relatif lebih tenang dan terlindung dan sangat subur juga aman bagi biota laut pada umumnya. Fungsi lain yang penting adalah sebagai penghasil bahan organik yang merupakan mata rantai utama dalam jaringan makanan ekosistem mangrove.

2.2.4.1. Fungsi Konservasi Hutan Mangrove

Hutan mangrove adalah hutan yang vegetasinya hidup di muara sungai, di daerah pasang surut dan di tepi laut, hutan bakau dibutuhkan hampir 80% dari seluruh jenis ikan laut yang dimakan oleh manusia. Hutan mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan yang penting di wilayah pantai.

Sebagai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrient bagi biodata perairan, hutan mangrove juga sebagai tempat berkembang-berkembangnya berbagai macam biodata pantai, penahan abrasi dan amukan gelombang badai dan tsunami, penyerapan limbah pencegahan intrusi air laut.

Hutan mangrove juga mempunyai fungsi ekonomis penting seperti penyediaan kayu bakar, dan daun-daun sebagai bahan baku obat. Kemampuan mangrove untuk mengembangkan wilayahnya kearah laut merupakan salah satu peran penting mangrove dalam pembentukan lahan baru. Akar mangrove mampu mengikat dan menstabilkan substrat lumpur, pohonya mengurangi energy gelombang dan memperlambat arus, sementara vegetasi secara keseluruhan dapat memerangkap sedimen. Penentuan penetapan kawasan pesisir dalam upaya pengembangan kawasan dapat dibagi menjadi beberapa kriteria kawasan, yaitu: menetapkan kawasan pantai menjadi kawasan kritis, kawasan perlindungan atau konservasi, kawasan budidaya dan produksi serta kawasan khusus.

Berdasarkan frekwensi air pasang, hutan mangrove dilokasi pesisir dapat dibagi menjadi tiga bagian zona yang ditumbuhi oleh tipe-tipe vegetasi yang berbeda-beda antara lain:

1. Paling terdekat dengan laut yang didominasi oleh *avicennia mariana* (api-api), *avicennia alba* (bogen) dan *sonneratia alba* (perepat). *Avicennia* tumbuh di atas tanah pasir kokoh, sedangkan *sonneratia* berasosiasi dengan

lumpur yang lunak. Komunitas ini sering disebut dengan istilah komunitas perintis.

2. Hutan pada subtract yang lebih tinggi yang didominasi oleh *Bruguiera cylindrica*. Hutan ini tumbuh pada tanah liat yang cukup keras dan dicapai oleh beberapa air pasang saja. Lebih jauh dari pantai yang didominasi oleh *Rizophora*, yang ditopang oleh akar-akar tunjang dengan pola percabangan yang khas.

Produksi serasah mangrove berperan penting dalam kesuburan dalam perairan pesisir dan hutan bakau dianggap yang penting produktif di antara ekosistem pesisir. Di Indonesia produksi serasah mangrove berkisar antara 7-8 ton/ha/tahun. Ekosistem mangrove juga sebagai daerah asuhan, daerah mencari makanan dan daerah pemijahan berbagai biota laut.

2.2.4.2. Pendayagunaan Hutan Mangrove

Pantai merupakan kawasan produktif yang dapat di optimalisasikan dalam berbagai peruntukan termasuk usaha-usaha komersial, industri, perkapalan, rekreasi, kehutanan, drainase, pengontrolan banjir perikanan tangkap, budidaya dan lain-lain. Pendayagunaan kawasan pantai yang tidak terkontrol akan menimbulkan perubahan-perubahan dalam ekosistem yang selanjutnya dapat merusak sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya.

Peranan mangrove dalam menunjang kegiatan perikanan pantai dapat disarikan dalam dua hal :

1. Bakau berperan penting dalam siklus hidup berbagai jenis ikan, udang, dan moluska, karena lingkungan mangrove menyediakan perlindungan mangrove menyediakan perlindungan dan makanan berupa bahan-bahan organik yang masuk ke dalam rantai makanan.
2. Mangrove merupakan pemasok bahan organik, sehingga dapat menyediakan makanan untuk organisme yang hidup pada perairan sekitarnya.

2.2.4.3. Partisipasi Masyarakat Dalam pelestarian hutan Mangrove

Partisipasi merupakan instrument untuk mencapai tujuan tertentu, dimana tujuan dimaksud adalah dikaitkan dengan keputusan atau tindakan yang lebih baik dalam menentukan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini partisipasi dating dari pola pandang masyarakat yang berada di desa penelitian, dengan tujuan pelestarian hutan mangrove.

Bila dilihat secara umum kata partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan mengambil peran tertentu dalam kegiatan pelestarian kawasan mangrove. Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat adalah kelompok penduduk yang dapat dikategorikan menjadi masyarakat local, masyarakat swasta, dan masyarakat umum yang ada di desa penelitian.

Tujuan lainnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan makna penting peran dan tanggung jawab bersama dalam menentukan masa depan kehidupan khususnya pelestarian hutan mangrove, sesuai dengan nilai-nilai budaya local maupun kebijakan nasional. Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian hutan mangrove sebaiknya ada keterlibatan aktif masyarakat secara sukarela dalam seluruh tahapan proses pembangunan bukan melalui para wakilnya . dikatakan bahwa pengertian tersebut mengandung substansi pokok yaitu:

1. Partisipasi dalam perencanaan kegiatan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan
3. Partisipasi dalam penerimaan manfaat
4. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi
5. Partisipasi dalam menerima resiko
6. Partisipasi masyarakat juga dapat berupa suatu perwujudan dari proses intervensi pemerintah dalam kehidupan masyarakat dengan pemberian bantuan bantuan yang bersifat stimulant/ perangsang.
7. Partisipasi secara kelompok ditunjukan dengan wujud perpanjangan tangan pemerintah ke tingkat masyarakat desa dengan memanfaatkan pihak-pihak yang telah menjadi kekuatan informal di desa itu.

2.2.5. Definisi Pariwisata

Definisi pariwisata sebagai antisipasi perkembangan dunia pariwisata yang sifatnya menggelobal, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang terdiri atas delapan bayaitu:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya Tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisata adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintahan daerah.
4. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta intraksiantara wisata, pemerintah, dan pemerintah daerah dan penguasa.
5. Daya Tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

6. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya Tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

7. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan tujuan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisata dan penyelenggaraan pariwisata.

8. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Pengembangan pariwisata adalah segala kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan, menyediakan semua sasaran dan prasarana, barang dan jasa, fasilitas yang diperlukan guna melayani kebutuhan wisatawan.

Marpaung dalam Hadiwijoyo (2012:58) menyatakan bahwa hal yang diperhatikan dalam pengembangan suatu daya Tarik wisata yang potensial harus dilakukan penelitian, inventarisasi dan evaluasi sebelum fasilitas wisata dikembangkan. Hal ini penting agar perkembangan daya Tarik wisata yang ada dapat sesuai dengan keinginan pasar potensial dan untuk menentukan pengembangan yang tepat dan sesuai.

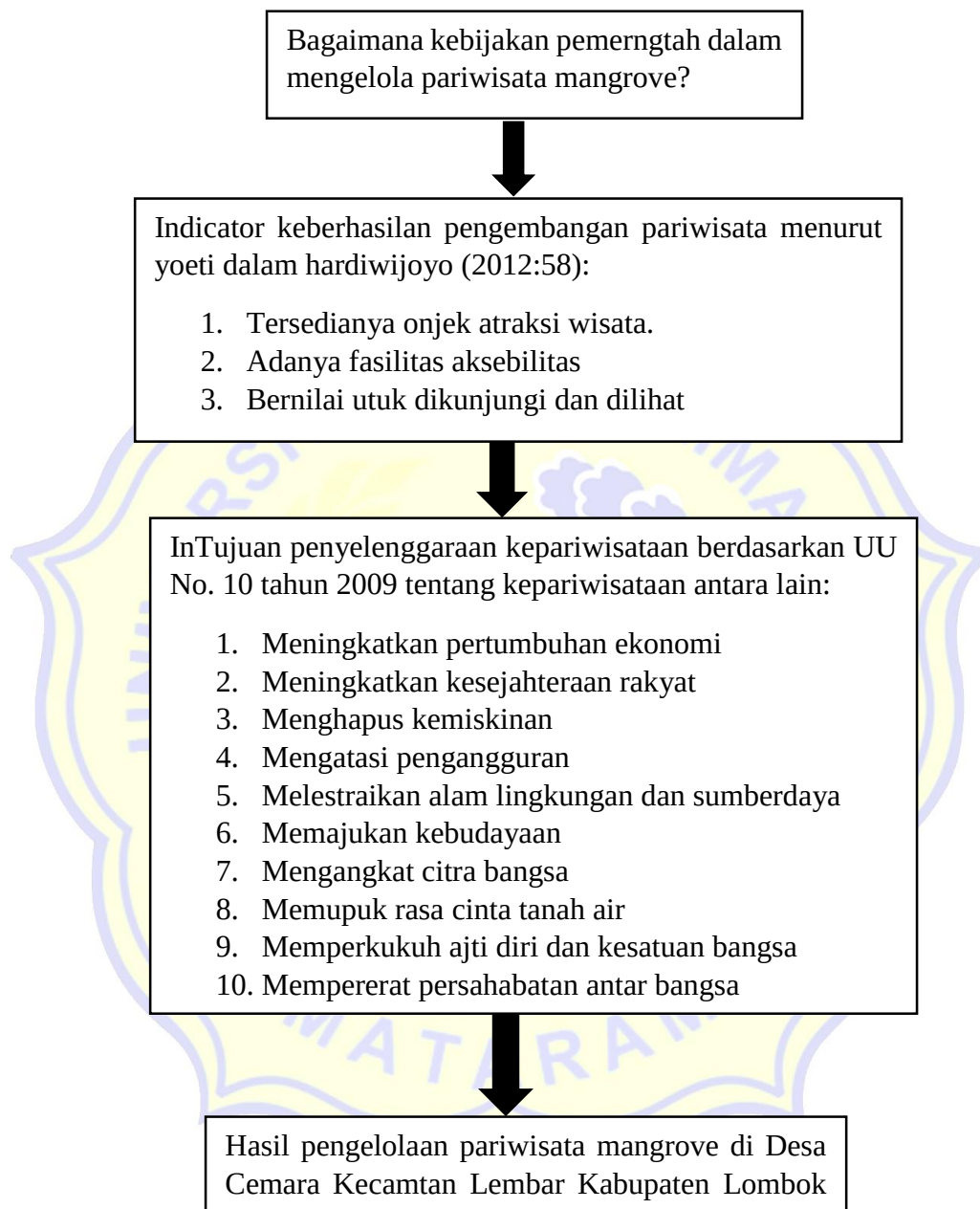
Sedangkan menurut Muljadi, (2009:32), untuk mewujudkan pembangunan pariwisata harus diperhatikan hal-hal, sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi masyarakat dan sosial budaya.
2. Nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat
3. Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup.
4. Kelanjutan dan usaha pariwisata itu sendiri.

Terkait dengan hal tersebut Yoeti dalam Hadiwijoyo (2012: 58) menyebutkan terdapat tiga faktor yang dapat menentukan keberhasilan pengembangan pariwisata sebagai suatu industri. Ketiga faktor tersebut adalah tersedianya objek atraksi pariwisata, adanya fasilitas aksesibilitas, dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat. Tujuan penyelenggaraan kepariwisataan Indonesia sendiri tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, antara lain:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. Menghapus kemiskinan
- d. Mengatasi pengangguran
- e. Melestarikan alam lingkungan dan sumberdaya
- f. Memajukan kebudayaan
- g. Mengangkat citra bangsa
- h. Memupuk rasa cinta tanah air
- i. Memperkukuh aji diri dan kesatuan bangsa

2.3. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti dengan penjelasan secara terperinci tentang permasalahan yang berhubungan dengan teori dan data yang ada, sehingga mendapat suatu kesimpulan (Bagong Suyanto, 2005 : 166).

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Tempat Pariwisata Mangrove Desa Cemara Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat. Pemilihan lokasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang kaya dengan data-data penunjang untuk penelitian ini sehingga dapat membantu permasalahan yang ada di lokasi penelitian.

3.3. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, maka jangkauan dari ruang lingkup penelitian ini perlu ditegaskan. Sesuai dengan judul yang penulis angkat, oleh karena itu peneliti ingin berfokus untuk mengamati dan meneliti Kebijakan Pemerintah Dalam mengelola Pariwisata Hutan Mangrove di Desa Cemara Kecamatan Lembar kabupaten Lombok Barat..

3.4. Metode dan Dasar Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai suatu

masalah, gejala yang diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada secara sistematis. Tipe deskriptif didasarkan pada peristiwa yang terjadi pada saat peneliti sedang melakukan penelitian di lokasi. Kemudian menganalisisnya dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada di teori dan selanjutnya menarik kesimpulan.

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada narasumber atau informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini yang dikaji adalah bagaimana Kebijakan Pemerintah Dalam mengelola Pariwisata Hutam mangrove Di Desa Cemara Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.

3.5. Informan Penelitian

Menurut Hamid Patilama (2013:12), informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Selain itu informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Jadi dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai subyek peneliti. Adapun subyek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa Cemara
2. Pengelola Pariwisata Mangrove
3. Masyarakat Setempat
4. Pengunjung

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2014:62). Adapun teknik pengumpulan data cocok untuk yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

. Menurut Hadari Nawawi (2005:100) bahwa observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan per catatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi harus konseptual sehingga informasi yang diperoleh akan dilihat dalam hubungan yang logis dan bermakna, bukan sebagai fakta lepas-lepas. Dengan dasar teoritis yang mendalam kita lebih sadar akan asumsi-asumsi dan hipotesis untuk di uji kebenarannya berdasarkan observasi yang seobyektif mungkin (Nasution, 2009 : 110). Pengamatan dalam metode ilmiah mempunyai kriteria (Sugiyono, 2014:309), yaitu sebagai berikut :

1) Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematis, artinya peneliti melakukan pengamatan ke lokasi pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam mengelola Pariwisata Hutam mangrove Di Desa Cemara Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.

2) Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan, artinya pengamatan dilakukan oleh peneliti mengacu pada desain penelitian yang telah dibuat sebelum terjun melakukan pengamatan di lokasi penelitian Kebijakan Pemerintah Dalam mengelola Pariwisata Hutam mangrove Di Desa Cemara Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.

3) Pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proporsi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu aset yang menarik perhatian saja, artinya peneliti dalam melakukan pencatatan hasil pengamatan melakukan analisa data dengan melakukan validasi data yang kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan dari fenomena yang terjadi dalam Kebijakan Pemerintah Dalam mengelola Pariwisata Hutam mangrove Di Desa Cemara Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.

4) Pengamatan dapat dicek dan dikontrol atas validitas dan rehabilitasinya, artinya hasil pengamatan yang dilakukan peneliti dalam mengamati Kebijakan Pemerintah Dalam mengelola Pariwisata Hutam mangrove Di Desa Cemara Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, dilakukan kroscek kebenarannya dan dilakukan pengontrolan atas kebenaran data tersebut kemudian diperbandingkan dengan data yang didapat baik dari wawancara maupun dokumentasi.

2. Wawancara

Esterberg dalam (Sugiyono,2014) mendefinisikan bahwa interview atau wawancara sebagai berikut, “ *interview is a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic* ”. Wawancara adalah pertemuan

dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diiteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal lain dari informan yang lebih mendalam.

3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan serta kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar , misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain

Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif (Sugiyono,2014:82).

3.7. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan data tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan. Untuk memperoleh data-data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

3.7.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian ataupun data yang bersumber dari informan atau narasumber yang berkaitan dengan variabel penelitian atau Kebijakan Pemerintah Dalam mengelola Pariwisata Hutam mangrove Di Desa Cemara Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat. Metode yang digunakan adalah metode wawancara (*interview*) kepada para pihak yang terkait dalam penelitian. Karena mengingat keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penelitian, peneliti tidak mungkin mengadakan wawancara dengan seluruh masyarakat desa Cemara, maka penyusun mengambil strategi untuk mewawancarai Kepala Desa Cemara, Pengelola Pariwisata Mangrove, serta masyarakat Setempat.

3.7.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder yang digunakan peneliti berupa arsip pemerintahan Desa, catatan peneliti dilapangan, foto-foto lokasin Pariwisata serta foto wawancara dengan berbagai informan yang sudah ditentukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian.